

GEJALA KESENJANGAN ANTARA IDEOLOGI DAN PRAGMATISME PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN

Tri Pranadji¹

ABSTRACT

For the last three decades, critics and discourse on concept or ideology regarding rural economic development is extremely weak. The aim of this paper is to give evidences of systematically failure of the said rural economic development. The basis of the failure is the unclear ideology used as the framework of rural economic development. The "Utopia" as an ideological basis to achieve the economic development goal can not be traced in the practical way in the yield. As a consequences, there is difficulties in assessing the said failure, in addition to substantial negative impact of development activities itself. With the monolithic political infrastructure, the nature of centralistic government as well as growth oriented development will deteriorate natural resources, widening income disparity and rural poverty, widespread of urban informal sector, and instability of feature economic development. To force economic globalization, it is necessary to conduct restructurization of rural economic development. Therefore, the formulating of systematical development activities have to consider the expert on economic sociology, people oriented economic, environment and rural economic development. In the future, the humanistic, fairness, and sustainable economic activity and development should be taken into account.

Key words: *discrepancy, ideology, pragmatism, development, economic, rural community.*

ABSTRAK

Koreksi kritis dan terbuka terhadap konsep ideologi dalam pembangunan ekonomi pedesaan masih jarang dikemukakan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menunjukkan adanya gejala kegagalan pembangunan ekonomi pedesaan yang bersifat sistematis. Kegagalan tadi diawali oleh adanya ketidakjelasan ideologi yang dijadikan kerangka kerja pembangunan ekonomi pedesaan. "Utopia" apa yang dijadikan dasar ideologis untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlacak dengan jelas dalam pragmatisme pembangunan ekonomi di pedesaan. Penekanan kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan dengan pendekatan pragmatisme di lapangan bukan saja menyulitkan diadakannya pelacakan terhadap kekeliruan pembangunan ekonomi pedesaan yang bersifat sistematis, melainkan juga membawa dampak negatif yang besar terhadap kegiatan pembangunan itu sendiri. Dengan tatanan politik yang monolitik, pemerintahan sentralistik dan menjebakkan diri dalam tatanan ekonomi yang menekankan pertumbuhan berlebihan bukan saja menimbulkan gejala pengurusan dan penghancuran sumberdaya alam; melainkan juga memunculkan kesenjangan ekonomi dan pemiskinan yang parah di pedesaan, berkembang pesatnya sektor ekonomi informal di perkotaan, serta tingginya kerentanan dan ketidakstabilan perkembangan perekonomian ke depan. Menghadapi tantangan globalisasi ke depan, penataan ulang pembangunan ekonomi pedesaan perlu dilakukan. Oleh sebab itu, perancangan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan sistematis harus melibatkan kalangan ilmuwan sosiologi ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi lingkungan dan pembangunan pedesaan. Di masa datang terwujudnya keadilan dalam kegiatan ekonomi yang lebih berkemanusiaan dan berkelanjutan harus mendapat penekanan lebih serius.

Kata kunci : *kesenjangan, ideologi, pragmatisme, pembangunan, ekonomi, masyarakat pedesaan.*

¹ Staf Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah diskusi informal dengan teman-teman peneliti pada akhir 1988 di Pusat Penelitian Agro Ekonomi (sekarang Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian), yang saat itu bertempat di Jl. Juanda 20 Bogor, secara intensif dibahas tentang kerapuhan struktur ekonomi Indonesia. Saat itu telah diketengahkan kemungkinan akan adanya krisis ekonomi yang bisa "mematikan" kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan. Ideologi ekonomi yang mengetengahkan tujuan pemerataan dan keadilan tidak cukup ditopang langkah-langkah sistematis yang mengarah pada terwujudnya tujuan tadi. Bahkan strategi industrialisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi perkotaan, didukung dengan utang luar negeri dalam jumlah besar, sistem politik yang monolitik, dan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik; sangat jauh bisa menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan yang berporos pada ekonomi pedesaan.

Dalam Jurnal *American Scientist*, Volume 83 (Juli – Agustus 1995), Hunt (1995) menyatakan: "..... saat ini kita hidup dalam suatu masyarakat di mana peranan ekonomi mendominasi peranan lainnya" (*today we live in a society where economic roles dominate other roles*). Bentuk atau tatanan ekonomi, dengan demikian, dapat dijadikan semacam "jendela" untuk melihat apakah suatu sistem masyarakat berkembang ke arah gambaran yang sehat atau tidak. Bentuk atau tatanan ekonomi tadi sedikit banyak dilatarbelakangi oleh jenis ideologi, baik dalam arti permanen atau sementara. Biasanya pilihan atas ideologi tadi mencerminkan visi elit atau pemimpin masyarakat suatu negara, atau hasil dari "permufakatan" anggota suatu sistem masyarakat yang lebih kecil lagi dimana ciri budaya "asli"-nya masih menonjol.

Tingkat "kegagalan" suatu pembangunan ekonomi, dengan demikian, dapat ditelusuri dari seberapa jauh terjadinya kesenjangan antara "visi" kaum atau tujuan ideologis (ekonomi) yang dianut dengan hasil dari pragmatisme pembangunan ekonomi yang telah atau sedang dijalankan. Kegagalan pembangunan ekonomi, misalnya, tidak dapat begitu

saja disederhanakan dengan mengetengahkan bahwa lingkungan alamiah yang menjadi penyebabnya. Dengan mengutip pernyataan Barbara Ward (1972), Buchory (1996) menyatakan "*the world is rich enough to satisfy everybody's needs, but not rich to satisfy everybody's greeds*". Adanya kerusakan habitat masyarakat (lingkungan) dan kemiskinan yang meluas, misalnya, pada akhirnya dapat juga ditelusuri dari seberapa besar individu masyarakat, organisasi atau suatu kelompok masyarakat terlalu mementingkan dirinya pada saat hidup tanpa banyak mempertimbangkan kepentingan kehidupan kelompok masyarakat lain dan masyarakat mendatang.

Makalah ini bertujuan mengetengahkan bahasan tentang beberapa gejala kesenjangan yang terjadi antara ideologi dan pragmatisme pembangunan ekonomi pada masyarakat pedesaan Indonesia. Beberapa proposisi yang akan ditelaah secara lebih seksama adalah:

- (1) Ideologi untuk pembangunan ekonomi yang menunjukkan kegagalan dalam menempatkan alam atau lingkungan sebagai faktor internalnya (endogen), sistem masyarakat tersebut akan dengan mudah dihadapkan pada "krisis" keberlanjutannya; dan hal itu sekaligus sebagai indikasi adanya gejala kesenjangan ideologi dan pragmatisme ekonomi yang dijalankan pemerintah.
- (2) Munculnya gejala ketidakmerataan dan kemiskinan yang parah pada masyarakat pedesaan dapat dinilai sebagai kegagalan pembangunan (*planned economic development*) yang telah direncanakan sebelumnya, dan hal itu dapat dijadikan petunjuk (masih) besarnya kesenjangan yang tajam antara ideologi dan pragmatisme ekonomi yang dijalankan pemerintah.
- (3) Tidak berubahnya struktur masyarakat pedesaan, terutama lapisan paling bawah, bukan saja hal itu sebagai petunjuk tidak sehatnya perkembangan masyarakat tadi, namun juga sebagai petunjuk tidak berjalannya ideologi ekonomi yang dirumuskan dari atas secara baik.
- (4) Berkembangnya ekonomi (sektor) informal di perkotaan bukan saja bisa dipandang sebagai gejala tidak berjalan sehatnya proses industrialisasi yang cepat, namun

juga sebagai petunjuk bahwa tatanan (ideologi) ekonomi yang ada hingga dewasa ini tidak memberi kesempatan yang cukup memadai bagi perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat pedesaan ke arah yang lebih sehat.

PENGERTIAN DAN PENGGUNAAN BEBERAPA KONSEP

Ideologi

Istilah ideologi dalam *Webster's New World Dictionary* (Neufeldt and Guralnik, 1988) mempunyai beberapa arti, *pertama*, sebagai kajian tentang gagasan (ide), sifat dan sumber yang membangkitkannya. *Kedua*, ia dapat diartikan sebagai pemikiran atau penteroran tentang suatu yang bersifat ideal (idealistik), abstrak, tidak praktis, atau (bahkan) bersifat khayalan yang spekulatif. *Ketiga*, ia juga dapat diartikan sebagai doktrin, opini, atau cara berpikir yang dianut secara individual, kelas atau kelompok dalam suatu sistem sosial, (rejim) ekonomi atau politik tertentu. Bisa ditarik gambaran lebih lanjut, bahwa dengan mengerti ideologi yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat seseorang bisa mengerti juga kekhasan visi suatu masyarakat dalam mengembangkan kegiatannya; bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang (budaya) politik dan kemasyarakatan yang lebih luas.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, Morishima (1990) menyatakan secara singkat, bahwa ideologi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang mengikat sekumpulan manusia ke dalam pengelompokan sosial. Dengan mengikuti penjelasan Durkheim, ideologi dapat juga disinonimkan dengan "agama". Dari gambaran tadi, penggunaan istilah ideologi mencakup juga "isme-isme" lainnya, seperti Marxisme dan Konfusianisme. Dapat disisipkan di sini bahwa istilah *marhaenisme*, seperti yang dirumuskan Soekarno, tercakup dalam istilah ideologi. *Marhaenisme* oleh Soekarno dianggap lebih cocok untuk menggambarkan pelaku-pelaku ekonomi "masyarakat Indonesia" yang secara individu umumnya berkemampuan serba kecil, bukan merupakan replikasi dari Marxisme atau kapitalismenya masyarakat Eropa.

Pada masyarakat yang telah berusia relatif lama dan mempunyai budaya atau sistem kepercayaan yang relatif mapan, menurut pengertian di atas, dapat saja mempunyai semacam ideologi sendiri. Lebih-lebih pada masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, kehadiran ideologi nasional, yang diharapkan bisa mengintegrasikan keragaman ideologi di tingkat sub-etnik (dan budayanya) dan agama, kemungkinan memang sangat diperlukan. Barangkali itulah sebabnya, mengapa para tokoh pendiri negara ini telah mencoba merumuskan sebuah ideologi nasional yang dinilai mempunyai sifat universal, yaitu: Pancasila, berdampingan dengan ideologi-ideologi lain yang telah dianggap mapan, seperti Marxisme-sosialisme dan liberalisme-kapitalisme. Ideologi ini diharapkan bukan saja berperan dalam "penataan" untuk mewujudkan keadilan di bidang kehidupan politik, namun juga di bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

Walaupun pada gugus masyarakat di tingkat nasional sudah ada ideologi besar, namun di tingkat "bawah" masih terdapat sub-ideologi atau ideologi kecil, seperti *mahdisme*-Islam dan *Ratu-adil* yang membentuk hubungan patronase dalam masyarakat, yang menjadi penyokongnya. Perbedaan penafsiran terhadap realitas sosial, karena masing-masing tokoh atau elit masyarakat menggunakan atau "berkedok" dengan kerangka ideologinya, merupakan sesuatu hal yang sangat mudah terjadi. Gejala-gejala kontradiksi sosial, seperti ketimpangan sosial yang parah, macetnya mobilitas sosial kelas bawah, kleptokrasi atau meluasnya budaya korupsi dalam jajaran birokrasi pemerintah, "kekacauan" hukum, dan "pengrusakan" lingkungan; dengan demikian, hal itu dapat dipandang sebagai petunjuk seberapa jauh terdapat kesenjangan antara visi ideologis dan pragmatismenya.

Utopia

Dalam *Webster's New World Dictionary* istilah *utopia* dapat diterjemahkan sebagai penggambaran tentang sesuatu (tempat, tahapan keadaan atau situasi); mencakup tatanan politik, ekonomi, dan sistem sosial; yang dinilai ideal atau sempurna (Neufeldt and Guralnik, 1988). Dalam kaitannya dengan gejala sosial, Mannheim (1991) membahas cukup jelas adanya kedekatan hubungan anta-

ra konsep ideologi dan utopia. Dijelaskannya walaupun sebenarnya terdapat perbedaan, tidaklah mudah menjelaskan perbedaan antara ideologi dan utopia. Kesamaannya adalah bahwa keduanya mempunyai kandungan arti sebagai gejala sosial yang belum terjadi atau gagasan yang ingin diwujudkan.

Dengan dasar bahwa pengetahuan manusia tidaklah dapat dilepaskan dari eksistensi kehidupannya, Mannheim (1991) mengatakan adanya perbedaan antara *utopia absolut* dan *utopia relatif*. Yang pertama merupakan gagasan-gagasan yang melampaui situasi tertentu yang pada prinsipnya tak pernah dapat terwujud; sedangkan yang kedua adalah suatu *utopia* yang agaknya tidak dapat diwujudkan hanya dari sudut pandang suatu tatanan sosial tertentu yang sudah ada.

Sebagai gambaran, menurut Budiman (1991), bagi para penganut sistem ideologi kapitalisme, sosialisme merupakan sesuatu yang *utopis*, dan tidak mungkin terjadi. Karena menurut anggapannya, sistem sosialisme tidak didasarkan pada "doktrin" bahwa pada dasarnya manusia adalah serakah terhadap kekayaan material. Bagi penganut ideologi kapitalisme, gambaran ideal manusia adalah makhluk sosial dapat dinilai sebagai *utopia absolut*. Begitu pula sebaliknya, barangkali, seorang penganut ideologi sosialisme dalam memandang manusia yang digambarkan oleh penganut ideologi kapitalisme.

Penganut sistem sosialisme beranggapan bahwa manusia merupakan makhluk yang dibentuk oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, dalam tatanan masyarakat sosialis, manusia dapat dibentuk menjadi makhluk sosial yang mau bekerja untuk orang lain tanpa terlalu menekankan pada imbalan material. Bagi penganut sistem sosialisme bahwa manusia diidealkan sebagai makhluk sosial, hal itu merupakan *utopia relatif*, dan begitu pula penganut sistem kapitalisme dalam meletakkan anggapan ciri manusia yang dijadikan dasar untuk menggambarkan tatanan masyarakat yang akan dibentuknya.

Pragmatisme

Dalam *Webster's New World Dictionary* istilah pragmatisme diartikan sebagai pendekatan atau kecenderungan filosofis yang

menentukan arti dan kebenaran tentang konsep ditarik dari segi konsekuensinya dalam praktek. Istilah ini dapat dikaitkan dengan operasionalisasi suatu konsep atau ideologi, yang dianut oleh suatu sistem masyarakat, dalam kenyataan sosial.

Secara logika, pragmatisme dapat dianggap sebagai suatu "jembatan" untuk melihat refleksi ideologi dalam dunia nyata. Seberapa jauh suatu ideologi, yang diberlakukan di masyarakat, dapat dikatakan "benar" dapat ditelusuri melalui gejala sosial yang ditimbulkan oleh pragmatisme yang dianut masyarakat tadi. Seandainya hasil pragmatisme ekonomi dalam kenyataan, misalnya menimbulkan gejala kontradiksi sosial yang besar, ada kesenjangan dengan visi ideologinya, maka dapat ditarik beberapa kemungkinan penjelasannya:

- (1) Ideologi yang ada tidak mempunyai keunggulan yang nyata untuk dijadikan wahana "alat" pengikat atau pengintegrasikan sistem sosial yang ada.
- (2) Bisa jadi visi ideologinya tidaklah jelek, namun pragmatismenyalah yang tidak sesuai dengan semangat ideologinya. Kemungkinan lainnya adalah bahwa hal itu disebabkan oleh budaya dan struktur sosial atau sistem politik, yang dipakai untuk mengoperasikan ideologi tadi, tidak cukup memadai.
- (3) Terdapat kesenjangan pemahaman, terutama di kalangan elit atau pemimpin masyarakat, antara makna ideologi dan pragmatismenya.

KERUSAKAN EKOSISTEM AKIBAT EKSPLOITASI

Para teoretisi yang membangun kerangka (ideologi) kerjanya di bidang ekonomi sosiologi tampaknya kurang memperhitungkan daya dukung ekosistem atau habitat masyarakat sebagai faktor *endogen*-nya. Dengan menggunakan konsep *Depressing Triangle*-nya (tekanan penduduk, kemiskinan, dan tekanan lingkungan), Aziz (1996), dalam pidato penguatan guru besarnya di bidang ekonomi, mengemukakan bahwa walaupun kemiskinan dan "krisis lingkungan" telah

menjadi permasalahan serius di banyak negara, namun kebanyakan ahli ekonomi (global) menganggap bahwa hal itu semata-mata sebagai gejala lokal. (Karena itu dapat dikemukakan di sini bahwa ideologi yang dijadikan landasan teori ekonomi sosiologi yang selama ini berlaku perlu dinilai kembali).

Dalam tulisannya berjudul: "*Economic Sociology: Historical Threads and Analytic Issues*" Martinelli and Smelser (1990) menyebutkan bahwa dalam membangun kerangka teori perubahan sosialnya, Marx menempatkan kontradiksi (kelas) sosial sebagai faktor utama perubahan, dan perubahan itu sendiri dicirikan oleh adanya "konflik abadi" antara kelas penguasa aset produksi dan kelas tenaga kerja. Transformasi sosial akan terus berlangsung segaris dengan proses ke arah pelenyapan faktor yang menyebabkan kontradiksi tersebut. Menurut pandangan Marx, selama struktur masyarakat diwamai atau disusun oleh perbedaan kelas ekonomi yang kontras (yaitu: kelas penguasa aset produksi dan kelas pekerja), maka dinamika atau perubahan sosial yang terjadi merupakan pertarungan antara dua kelas untuk memperebutkan nilai lebih tenaga kerja. Dengan menggunakan kasus industrialisasi yang berlangsung di Eropa Barat, konflik yang terjadi di masyarakat kapitalistik terutama disebabkan oleh adanya eksploitasi kelas elit penguasa (kapital atau aset produksi) terhadap kelas massa tenaga kerja.

Marx memandang bahwa yang mendasari terbentuknya struktur masyarakat adalah kekuatan produksi (peralatan mesin, tenaga kerja, dan ketrampilan teknik) dan kekuatan sosial (hak pemilikan perorangan, kewenangan, dan hubungan kelas). Selama struktur masyarakat masih mengandung perbedaan kelas ekonomi, yang mencerminkan tatanan masyarakat kapitalistik, selama itu pula sistem masyarakat tadi memiliki benih kontradiksi internal yang permanen. Perubahan sosial digambarkan sebagai bagian dari "konflik abadi" antara dua kelas ekonomi, sampai terbentuknya masyarakat (*ideal-utopia*) tanpa kelas (*classless society*, Maclver and Page, 1962).

Sumberdaya alam sebagai kekuatan bebas (otonom) dan mempunyai peran cukup besar dalam menstabilkan perubahan sosial

luput dari perhatian Marx, (dan juga pemikir ekonomi klasik lainnya). Pada beberapa kasus masyarakat pedesaan di Indonesia menunjukkan, bahwa konflik abadi antar dua kelas sosial yang ekstrim ternyata banyak yang bisa dihindarkan. Disamping faktor budaya setempat, eksploitasi antar dua kelas tadi sebagian dapat ditransformasikan menjadi eksploitasi terhadap sumberdaya (lingkungan) alam. Pada banyak sistem masyarakat tradisi (pedesaan) dijumpai adanya semacam aturan main, menurut budaya setempat, yang bisa menciptakan keteraturan hubungan antara sistem sosial dan eksploitasi terhadap habitat (alamnya). Ini sekaligus menunjukkan bahwa surplus nilai ekonomi tidak semata-mata hanya bersumber dari faktor produksi endogen, seperti: tenaga kerja, peralatan produksi dan teknologi, melainkan juga karena kerusakan alam.

Kita dapat mengatakan bahwa gejala kontradiksi sosial tidak selalu diikuti dengan "konflik terbuka" yang berkepanjangan; selama faktor kerusakan alam bisa memberikan peluang kelas masyarakat bawah memperoleh jaminan hidup. Scott (1989) menyatakan bahwa masyarakat kelas bawah baru akan melakukan pemberontakan secara terbuka jika eksploitasi terhadap mereka menyinggung atau mengancam (garis) batas subsistensinya. Selama jaminan subsistensi kelas bawah tadi "aman", eksploitasi antar kelas atau kontradiksi sosial yang mengarah berlangsungnya "konflik abadi", hingga terbentuknya peniadaan kelas sosial, belum tentu menjadi kenyataan.

Tingkat kontradiksi sosial dapat ditelusuri dari sejauhmana tingkat kerusakan habitat atau ekosistem, yang menopang kelangsungan hidup sistem sosial, sebagai akibat eksploitasi dari kegiatan ekonomi masyarakat. Pemilikan perorangan atas sumberdaya ekonomi di pedesaan Indonesia, terutama pemilikan atas lahan, tidaklah mencakup atas semua lahan. Sumberdaya lahan di pedesaan hingga sekarang masih banyak yang terlihat dikuasai secara kolektif atau "komunal", yang diatur oleh hukum tradisi atau adat setempat. Model pemilikan sumberdaya lahan yang demikian ini agaknya bisa menjadi peredam konflik (*safety valve*) yang cukup efektif, karena ketegangan hubungan eksploitasi antar dua kelas sosial dapat dialihkan pada eksploitasi terhadap sumberdaya alam setempat.

Pada gilirannya kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan: "Apakah tingkat kerusakan habitat atau lingkungan alam bisa dijadikan sebagai indikator kesenjangan ideologi dan pragmatisme pembangunan ekonomi?". Pemberontakan masyarakat kelas bawah, mengikuti pemikiran Scott (1989), baru akan terjadi jika sumberdaya alam menipis dan akhirnya tidak mampu lagi menopang kebutuhan subsistensi masyarakat. Karena itu, dapat dikemukakan bahwa kerusakan atau menipisnya kemampuan habitat atau (mutu) sumberdaya lahan dapat dijadikan sebagai indikator adanya gejala kontradiksi sosial yang gawat atau eksploitasi yang berlebihan antar kelas sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Pragmatisme pembangunan ekonomi seringkali mengabaikan daya dukung alam. Thijssse (1982), seorang peneliti irigasi dan ekologi pertanian dari Belanda, pada awal 1970-an telah memperingatkan tentang praktek penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang berimplikasi menghancurkan ekosistem pedesaan pertanian Jawa. Meluasnya lahan kritis (misalnya akibat erosi dan terlalu intensifnya campur tangan masyarakat), banjir, rusaknya hutan primer, dan menurunnya keragaman hayati merupakan gambaran populer akibat adanya gejala *over eksploitasi* terhadap lahan; dan hal itu sekaligus juga mencerminkan gejala "kegagalan" penerapan ideologi untuk menciptakan keteraturan sistem sosial.

KETIDAKMERATAAN DAN KEMISKINAN

Martinelli dan Smelser (1990) menyebutkan bahwa pembahasan sosiologi ekonomi dapat dilakukan dengan menengahkan dua pendekatan, yaitu: pertama, dari sudut mekanisme atau hukum "keseimbangan pasar". Pendekatan ini diikuti oleh Talcott Parson dan Neil Smelser. Dari sudut pendekatan ini, campur tangan pemerintah dalam pengaturan sosial dimungkinkan, sejauh hal itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pasar. Pendekatan kedua, yaitu yang memandang bahwa proses yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan mengikuti hukum dialektika atau konflik

(kepentingan) antar pelaku-pelaku ekonomi untuk memperebutkan nilai lebih dari tenaga kerja. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx.

Penny (1990), dalam bukunya berjudul "Kemiskinan dan Peranan Sistem Pasar" menyinggung tentang kegagalan peranan ekonomi pasar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Munculnya gejala kemelaratatan atau kemiskinan menunjukkan bahwa peranan ekonomi pasar tidaklah dapat dijadikan faktor tunggal untuk mewujudkan kesejahteraan atau keadilan ekonomi. Dengan mengambil kasus negara-negara di Eropa Barat abad 18-19, Polanyi (1957) menyatakan bahwa dengan mengandalkan kekuatan ekonomi pasar dipadukan dengan kesepakatan negara-negara besar untuk tidak berperang selama seratus tahun (*a hundred year peace*), perekonomian negara-negara di Eropa Barat melaju dengan pesat. Namun bersamaan dengan itu, sebagai kelanjutan industrialisasi, sistem masyarakat seakan-akan terbelah menjadi dua golongan besar, yaitu golongan miskin, mewakili mayoritas (buruh), dan golongan penguasa kapital, mewakili minoritas.

Dalam bukunya berjudul "Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin", Myrdal (1980) menyebutkan tentang tidak realistiknya asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori ekonomi. Asumsi yang (misalnya) menganggap bahwa mekasmisme pasar akan menciptakan hukum keseimbangan yang stabil terhadap tatanan masyarakat adalah gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam tulisan Martinelli dan Smelser (1990) juga diperoleh gambaran bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam ilmu ekonomi yang sudah harus mengalami revisi. Beberapa perbaikan asumsi yang tampak menonjol adalah penerapan ide rasionalitas yang tidak hanya diberlakukan untuk individu, namun juga untuk publik dan komunal; dan ide pelembagaan nilai keteraturan melalui campur tangan dari luar (mencakup campur tangan pemerintah).

Dikatakan oleh Myrdal (1980), jika kekuatan ekonomi pasar tidak memperoleh "rintangan" maka besar kemungkinan akan terjadi bentuk ketidak seimbangan dalam perdagangan, perpindahan modal, dan migrasi secara intensif. Munculnya perbedaan kemaju-

an antar negara atau bangsa, kaya dan miskin, tidak semata-mata faktor sejarah atau kolonialisme; namun juga akibat masing-masing negara memberikan iklim yang berbeda bagi tumbuhnya semangat kewirausahaan atau etos kerja ekonomi.

Disamping faktor kewirausahaan (misalnya *spirit of capitalism* yang oleh Weber disejajarkan dengan *Ascetic Protestantism*), pada saat yang sama perkembangan ekonomi masyarakat Eropa pada abad 18 didorong juga dengan berlangsungnya pembentukan masyarakat industri dan gerakan kelas menengah untuk memperjuangkan demokrasi. Perkembangan ekonomi masyarakat Eropa bukan semata-mata faktor kapital, teknologi, dan semangat kewirausahaan; namun juga oleh tumbuhnya faktor kesadaran kelas menengah untuk mewujudkan gerakan pembebasan dari dominasi kelompok feodal. Ada semacam kesejajaran antara kemajuan ekonomi dengan perubahan struktur masyarakat dari yang semula bertatanan feodalistik menjadi ke arah yang demokratis.

Hasil penelitian Pranadji, dkk. (1991) di Kabupaten Aceh Besar memberikan gambaran, pertama, kecamatan yang menunjukkan gambaran penduduknya mengalami kemiskinan yang gawat justru wilayah kecamatan yang tingkat pendapatan rata-rata per kapitanya paling tinggi. Kedua, daerah kecamatan miskin tadi banyak didapati tuan-tuan tanah, pemilik-pemilik ternak dalam jumlah besar, dan dekat dengan kota. Ketiga, pemilik lahan adalah yang dahulu mempunyai akses terhadap hukum pemilikan lahan (yang menjadi faktor produksi utama perekonomian setempat) feodal (kerajaan), dan bekas bangsawan setempat. Keempat, kemajuan ekonomi wilayah setempat tidak didukung dengan peningkatan peran serta pelaku-pelaku ekonomi kelas bawah; sehingga dapat dikatakan "ekonomi setempat meningkat, tapi kesejahteraan masyarakat mundur". Ini terjadi karena kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh sejumlah kecil pelaku ekonomi kelas atas.

Bahwa semangat kewirausahaan, sebagaimana dikemukakan Schumpeter, Weber, dan Hagen dalam Martinelli dan Smelser (1990), sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan kelas sosial tampaknya memang tidak dapat diingkari. Dengan

mengambil kasus di Jawa dan Bali, Geertz (1989) menggambarkan adanya perubahan "etos kerja" pada beberapa anggota bangsawan Bali, yang hal itu menjadikan para bangsawan tadi lebih bisa menunjukkan perannya dalam lapangan ekonomi. Dari studi Geertz juga diperoleh gambaran bahwa dengan lebih mengandalkan semangat kewirausahaannya (dari pada, misalnya, dengan mempertahankan statusnya sebagai bangsawan, ternyata para bangsawan tadi bisa menunjukkan keberhasilannya dalam mengembangkan usaha ekonomi (lewat jalur industri kecil dan perdagangan). Hanya saja, peran para bangsawan ini pada akhirnya tidak dapat meluas, karena adanya hambatan kebijakan "ekonomi dualistik" yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu.

Pengaruh campur tangan pemerintah yang kurang memberikan tumbuhnya iklim demokrasi ekonomi, misalnya dengan perlakuan pilih kasih atas pelaku-pelaku ekonomi tertentu, menjadikan peran etos kerja tidak bisa dikembangkan menjadi penggerak ekonomi atau alat untuk melakukan mobilitas vertikal yang meluas. Kasus penerapan kebijaksanaan "ekonomi dualistik" oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kesenjangan antara perekonomian berbasis komunal ("pribumi") dan perekonomian berbasis perdagangan internasional ("Hindia Belanda"). Sebagai akibatnya, perekonomian masyarakat tradisional berkembang dengan putaran lambat; sedangkan perekonomian masyarakat Hindia Belanda relatif aman dari ancaman persaingan dari masyarakat pribumi.

Mengutip pendapat Wallerstein, Budiman (1990) dalam Kunio (1990) menyatakan bahwa sifat dari kapitalisme tidak menghendaki persaingan yang sehat, tapi menghendaki hak istimewa (monopoli). Sistem ekonomi pasar, yang dewasa ini dianggap menjadi pilar kekuatan perekonomian kapitalis, memiliki semacam "cacat bawaan" untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis. Kontradiksi sosial, tanpa kendali moralitas atau ideologi kolektif setempat, yang dapat muncul dalam masyarakat pembangunan ekonominya menganut pola kapitalistik akan dicirikan antara lain adanya kesenjangan yang tinggi dan meluasnya gejala kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

Masyarakat Jepang yang mempunyai etos kerja yang kuat, yang diwarnai oleh sinkretisme antara ideologi lokal dan konfusius, tidak menggarap perekonomiannya yang kapitalistik hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar. Tatanan masyarakat mereka tidak dibiarkan berkembang seperti masyarakat kapitalis barat, yang lebih mengandalkan rasionalismenya berdasar kepentingan individu. Bagi masyarakat Jepang, rasionalitas ekonomi tetap dibingkai dalam kolektivitas yang (sedikit banyak) bersifat paternalistik. Dengan demikian, walaupun kesenjangan antar sektor ekonomi (*big enterprise* dan *small business*) tetap ada, namun kontradiksi internal yang timbul relatif tetap terkontrol dan tidak melahirkan persoalan sosial yang gawat.

Pada kasus di Indonesia, yang pragmatisme pembangunan ekonominya cenderung memacu pertumbuhan, menjadi lebih menekankan meningkatkan ekspor daripada menguatkan pasar domestik. Akibatnya, pelaku-pelaku ekonomi kuat yang memperoleh kemudahan (misalnya dalam perijinan usaha, kredit lunak perbankan, reduksi pajak, dan keringanan tarif impor), dan memposisikan mereka pada kelas menengah yang sangat tergantung pada "belas kasihan" pemerintah. Mereka umumnya lebih memilih melakukan praktek perkolusian dengan para politisi atau pejabat pemerintah daripada (misalnya) membangun jaringan kekuatan dengan struktur ekonomi masyarakat tradisional atau ekonomi kelas bawah. Rahardjo (1990) mengatakan pemacuan industrialisasi ternyata diikuti dengan kenaikan nilai impor. Industrialisasi yang berimplikasi demikian bisa disebut industri yang *foot lorse*.

Perkiraan defisit transaksi berjalan tahun 1995 yang mencapai US \$ 11,5 milyar (Harian KOMPAS, 17 Januari 1996) dan pada tahun 2000 hutang Indonesia mencapai di atas US \$ 100 milyar, hal itu memberikan gambaran bukan saja instrumen ekonomi yang dibuat tidak berhasil menumbuhkan iklim kewirausahaan yang sehat, namun juga menggambarkan bahwa tidak efisiennya tatanan ekonomi yang ada hingga sekarang ini. Dalam menerapkan pragmatisme ekonominya, pemerintah pada masa Orde Baru dan awal Reformasi tampaknya masih belum berhasil mengatasi kesenjangan antara perekonomian tradisional-agraris dan perekonomian modern-industri. Akibat

lebih lanjut, kesenjangan ekonomi tadi tercermin juga pada semakin besarnya jumlah masyarakat yang tergolong sulit memperoleh lapangan pekerjaan yang layak, baik di (terutama) pedesaan maupun perkotaan.

Konsekuensi pemacuan pertumbuhan ekonomi yang berlebihan di masa lalu (yang bersendikan bantuan modal dari luar negeri) bukan saja membawa akibat kurang menggerakkan bagi perekonomian masyarakat pedesaan, melainkan juga tidak berhasil menumbuhkan sektor pertanian sebagai tulang punggung (*back-bone*) perekonomian pedesaan dan nasional. Gejala perekonomian pedesaan, yang berbasis sumberdaya pertanian, semakin tersubordinasi dengan perekonomian perkotaan yang mengalami *foot-lose* tidak terelakkan. Akibatnya, keruntuhan perekonomian nasional saat ini berdampak besar terhadap kehidupan perekonomian pedesaan, terutama di sektor tanaman pangan.

Dari tahun ke tahun subsidi input produksi pertanian, misalnya pupuk dan obat-obatan, oleh pemerintah dikurangi dan hal ini menjadikan beban biaya produksi usaha pertanian meningkat. Mengingat pertanian masih menjadi sektor ekonomi yang relatif dominan di pedesaan, maka dampak pengurangan subsidi tadi akan menempatkan pelaku-pelaku ekonomi pedesaan, khususnya petani tanaman semusim, menanggung beban biaya produksi lebih berat. Kelompok masyarakat petani di pedesaan ini, jika menghadapi posisi sulit, tidak begitu saja mudah mencari pekerjaan di luar pertanian yang membutuhkan keahlian khusus.

Mengingat dukungan kekuatan administrasi dan pemerintahan desa yang masih relatif lemah, dan terlebih lagi dengan masih berlakunya upaya "mendepolitisasi" masyarakat pedesaan; hal itu menjadikan pelaku-pelaku ekonomi pedesaan tidak mempunyai posisi tukar yang memadai dalam berhadapan dengan pelaku-pelaku ekonomi lain yang lebih kuat, terutama pelaku-pelaku ekonomi kota. Akibat dari situasi ini, baik secara politik maupun budaya, sistem masyarakat pedesaan menjadi sub-ordinasi sistem masyarakat perkotaan. Kesenjangan ekonomi yang tampak di permukaan, dengan demikian, sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh kesenjangan di bidang sosial dan politik.

Globalisasi atau internasionalisasi sistem perekonomian nasional diperkirakan akan semakin menempatkan sistem masyarakat pedesaan pada posisi yang semakin lemah. Kemampuan mereka untuk menjangkau lembaga-lembaga perekonomian modern, seperti perbankan, relatif sangat terbatas. Produk yang mereka hasilkan, karena kurang didukung oleh keterampilan, kapital, dan struktur pasar yang tidak sempurna menjadi kurang bisa menghasilkan nilai tambah yang relatif tinggi. Surplus ekonomi yang mereka hasilkan, dengan mengandalkan luas lahan terbatas (rata-rata kurang dari 0,5 ha) menjadi kurang bisa dijadikan sebagai "alat" untuk melakukan mobilitas vertikal. Secara politis, masyarakat pedesaan hampir tidak pernah secara aktif diajak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik di tingkat nasional (Pranadji, 2001). Situasi ini memberikan penegasan bahwa dengan terjaringnya sektor ekonomi pedesaan dalam globalisasi pasar, hal ini semakin mempertajam adanya kesenjangan antar pelaku ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

EKONOMI INFORMAL DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Sejak 1980-an dikenal ada dua golongan sektor ekonomi, yaitu sektor informal dan sektor formal. Pada masa Orde Lama dan awal ekonomi Orde Baru dirancang tidak dikenal adanya istilah sektor informal. Menganggap bahwa munculnya istilah sektor informal sebagai "katup pengaman" pembangunan juga baru dikenal akhir dekade 80-an. Penggunaan istilah katup pengaman dianggap belum final, sehingga terbuka untuk ditinjau secara lebih kritis. Lebih tepat jika istilah katup pengaman satu itu dijadikan tempat bersembunyi kalangan Ekuin untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Kesalahan ini menjadi tidak bisa disembunyikan lagi setelah terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan 1998. Terlebih lagi setelah diketahui publik bahwa hutang Indonesia saat ini tidak kurang dari Rp 650 triliun (Rachbini, 2002), dan aliran hutang tadi sebagian besar masuk pada sektor ekonomi formal di perkotaan.

Munculnya ekonomi informal bisa dipandang sebagai bentuk kegagalan pengembangan ekonomi yang mengikuti tatanan ideologi kapitalis liberal. Penekanan kegiatan ekonomi yang hanya mendasarkan pada kekuatan kapital membawa dampak besar terhadap aspek ketenagakerjaan. Mubyarto (2002) menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia yang sangat besar terhadap "belas kasihan" IMF hingga saat ini bisa dijadikan bukti gagalnya penerapan tatanan ekonomi kapitalis di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dan tidak memperoleh kesempatan bekerja di sektor perekonomian formal memaksa mereka mencari jalan sendiri. Pesatnya perkembangan sektor ekonomi informal di perkotaan bisa dipandang sebagai limbah besar tatanan perekonomian kapitalis global yang diterapkan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun terakhir.

Istilah ekonomi informal tidak asli dari kosa kata atau digali di bumi Indonesia. Bagnasco (1990) menyebutkan istilah *ekonomi informal*, yang diangkat dari kasus di negara Italia, mencakup tiga bidang:

- (1) Ekonomi rumah tangga; yang dicirikan bahwa orientasi produksi tidak untuk diperjualbelikan, dilakukan oleh anggota keluarga bersangkutan, dan sebagian besar hasilnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.
- (2) Ekonomi bawah tanah, tersembunyi dan "gelap"; yang dicirikan bahwa orientasi produksi sebagian besar diperjualbelikan atau dibarterkan, yang sebagian atau keseluruhan aktivitasnya tidak terjangkau oleh lembaga perpajakan resmi atau pengawasan pemerintah
- (3) Ekonomi komunal; orientasi produksi tidak untuk diperjualbelikan atau dibarterkan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan baik secara perorangan atau kelompok, hasilnya mungkin diperoleh dengan cara berbeda, dan yang menjadi kelompok produsennya bukanlah konsumen utamanya.

Disebut ekonomi informal, menurut Bagnasco (1990), karena jika akan dicari ciri-ciri uniknya untuk dipetakan, misalnya melalui cara perbandingan dengan ekonomi formal akan dijumpai banyak kesulitan. Ciri khas dari ekonomi informal justru terletak pada sukarnya

diperoleh kekhasan cirinya. Ekonomi informal ini umumnya adalah berciri ganda. Sebagai contoh, mekanisme keteraturannya didasarkan pada campuran antara mekanisme pasar dan resiprositas. Diferensiasi tenaga kerjanya yang terlibat tidak sepenuhnya dengan spesialisasi yang tinggi, namun juga tidak bisa dikatakan tanpa spesialisasi sama sekali.

Kekhaburan ciri ekonomi informal seperti yang dikemukakan Bagnasco (1990) bisa dipahami karena ia mendasarkan studinya pada masyarakat yang sudah berperadaban relatif maju, khususnya di negara Italia (Eropa Barat). Akan berbeda halnya jika konsep ekonomi informal ini dicobakan untuk melihat masyarakat di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Walaupun menurut beberapa ahli ekonomi (sektor) informal, misalnya Hidayat (1987) dan Manning dan Effendi (1985), tidak bisa didefinisikan atau diteorikan secara jelas, namun kehadiran sektor informal di perkotaan di negara-negara dunia ketiga cukup kontras.

Konsep ekonomi informal yang dikemukakan Bagnasco (1990) tampaknya akan kurang sesuai untuk menganalisis permasalahan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya di Indonesia. Kita akan banyak mengalami kesukaran untuk membuat perbedaan yang kontras antara aktivitas ekonomi informal dan ekonomi formal di pedesaan. (Apa yang disebut formal dan informal di pedesaan? Jawaban pertanyaan tadi kemungkinan hanya dapat dikemukakan jika yang melakukan penganalisaan adalah "peneliti" yang beranggapan bahwa yang disebut maju atau modern adalah yang melambungkan peradaban kota; dan sebaliknya bahwa yang terbelakang adalah desa). Namun sebaliknya, kita akan merasa lebih mudah untuk membuat perbedaan tadi pada perekonomian masyarakat di perkotaan.

Mengapa kegiatan ekonomi atau sektor informal ini banyak muncul di perkotaan? Annonymous (1996) menyebutkan munculnya ekonomi informal di perkotaan antara lain disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan sektor pedesaan yang lambat. Ciri pelaku ekonomi informal di perkotaan Indonesia umumnya tidak memiliki ketrampilan teknik yang relatif memadai. Mereka yang bekerja di sektor informal di

perkotaan umumnya adalah orang-orang desa yang "terpaksa" bermigrasi untuk mencari pekerjaan di kota; dan umumnya juga mereka ke kota tanpa mempunyai kapital yang memadai, dan membawa peradaban dan budaya desa.

Pranadji (1993), dalam kerangka hubungan antara masyarakat desa dan kota, memandang bahwa munculnya ekonomi atau sektor informal di perkotaan disebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang relatif ekstrim antara kemajuan yang dicapai sistem masyarakat pedesaan dan perkotaan. Gejala ketidakseimbangan tadi adalah akibat industrialisasi yang relatif cepat di perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan di bidang upah dan lapangan kerja, penurunan nilai tukar ekonomi produk pedesaan (umumnya adalah bahan mentah hasil pertanian) terhadap produk (industri) perkotaan, perkembangan infrastruktur di perkotaan yang relatif pesat, kelangkaan sumberdaya (lahan) pertanian di pedesaan, dan perubahan apresiasi lapangan kerja terutama bagi generasi muda pedesaan.

Konsep Bagnasco (1990) yang mempunyai kekhasan adalah yang disebut pada "butir 2", yaitu tentang ekonomi bawah tanah, tersembunyi dan gelap. Konsep ini tampaknya bisa diberlakukan untuk menganalisa perekonomian pedesaan dan perkotaan sekaligus. Hanya saja, khusus untuk masyarakat pedesaan, yang tingkat pendidikan formal atau baca tulis masyarakatnya masih relatif rendah, istilah "pengawasan hukum" tidak bisa hanya didasarkan pada hukum formal yang belum mengakar pada kehidupan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan pengawasan hukum yang didasarkan pada norma dan budaya setempat daripada (misalnya) perlu diberi tempat yang lebih tegas. (Istilah hukum formal di pedesaan tidak begitu dikenal oleh masyarakatnya).

Untuk kasus di Indonesia dapat dikemukakan bahwa munculnya sektor informal di perkotaan dapat dipandang sebagai kegagalan perencanaan dan pragmatisme pembangunan ekonomi oleh negara. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa kesenjangan ekonomi yang tajam antara sektor perkotaan dan pedesaan merupakan penyimpangan dari pembangunan. Melakukan proses modernisasi, melalui jalur teknologi, kapital, dan stabilitas politik, tanpa memberi kesempatan yang cukup pada sebagian besar masyarakat lapisan bawah

untuk menguasai faktor produksi yang memadai, hal itu akan mengarahkan perkembangan masyarakat pada situasi yang polaristik.

Munculnya golongan (minoritas) elite ekonomi yang sangat kaya di perkotaan (industri dan jasa ketrampilan) dan golongan massa yang miskin di pedesaan (pertanian dan jasa tenaga tanpa ketrampilan) dapat dipandang sebagai dampak dari pragmatisme ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat ideologi pemerataan dan keadilan sosial. Karena munculnya sektor informal di perkotaan tidak dapat dilepaskan dari gejala kesenjangan yang tajam antara kemajuan ekonomi di perkotaan dan pedesaan, maka munculnya ekonomi atau sektor informal di perkotaan dapat dipandang sebagai petunjuk adanya kesenjangan antara ideologi dan pragmatisme ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan ideologi (plus terjemahannya) dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi pedesaan seharusnya menjadi tetap menjadi perdebatan ilmiah yang produktif. Patut disayangkan bahwa para perancang pembangunan ekonomi di kalangan Ekuin tampaknya masih enggan mengajukan hal ini sebagai wacana publik yang berkualitas. Menganggap bahwa pilihan ideologi dalam pembangunan pedesaan tadi sudah "final" merupakan sikap yang jauh dari kedewasaan intelektual. Selama sikap demikian ini terus dipertahankan, kesenjangan yang besar antara pemikiran di tingkat gagasan ideal (ideologi) dan strategi pelaksanaan di lapangan untuk mencapai tujuan ideal tadi akan tetap menjadi abadi.

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan hingga dewasa ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dan berkelanjutan. Ideologi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi pedesaan tampaknya belum berhasil dirumuskan dengan jelas, dan dalam pelaksanaannya mengalami banyak kekhayaban. Dengan demikian, secara teoritis dapat diprediksi bahwa akan terjadi kesenjangan yang lebar antara tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan tingkat pencapaiannya.

Ideologi pergulatan kelas secara terbuka yang mengarahkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas dinilai terlalu menafikan peranan sumberdaya alam dan kelembagaan lokal, yang selama ini memberi kontribusi yang besar bagi terbentuknya stabilitas kehidupan masyarakat komunal di pedesaan. Selama masyarakat pedesaan dapat memperoleh jaminan kebutuhan subsistensinya gejala pergulatan kelas secara terbuka sukar terjadi. Pemenuhan kebutuhan subsistensi tadi dapat diperoleh dari tersedianya sumberdaya alam dan tatanan budaya setempat yang menghormati adanya kebutuhan hidup bersama. Peluang terjadinya konflik akan semakin terbuka ketika ketersediaan sumberdaya alam semakin menipis hingga menyulitkan untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama pada tingkat subsisten.

Ideologi pasar yang dibarengi dengan proses industrialisasi yang cepat dan dikendalikan oleh sistem aliran kapital dan arus perdagangan terbuka telah menimbulkan ketidakseimbangan yang berat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Dewasa ini gejala ketidakseimbangan tadi telah menjelma dalam bentuk ketimpangan ekonomi yang berat antara ekonomi kota dan desa, antara sektor pertanian dan industri dan antara kelas penguasa kapital (dan teknologi) dan masyarakat kecil di pedesaan. Golongan masyarakat bawah yang mayoritas tertinggal jauh dengan golongan masyarakat atas berjumlah sedikit.

Peran pemerintah dalam pengendalian pembangunan ekonomi pedesaan masih belum sepenuhnya mampu menerapkan asas keadilan. Tindakan pilih kasih aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang condong pada pelaku ekonomi kuat di perkotaan dan kegiatan industri yang memperoleh dukungan kemudahan dalam memperoleh kapital masih sulit ditutupi. Gejala ini sebenarnya sudah merupakan "cacat bawaan" yang melekat pada ideologi sistem pasar bebas yang merupakan pilar ideologi kapitalis-liberal. Cacat bawaan ini menjelma menjadi sistem ekonomi "monster" karena (mungkin tanpa disadari) disempurnakan oleh para ilmuwan (lulusan Barat) di kalangan yang masih "mengasingkan diri" dengan tatanan sosio-budaya masyarakat pedesaan di Indonesia.

Semakin membesarnya sektor informal di perkotaan dapat dipandang sebagai akibat kesenjangan yang berat dalam tatanan ekonomi yang tidak kondusif untuk pembangunan pedesaan. Perkembangan sektor ini adalah dampak dari diterapkannya pragmatisme ekonomi yang berlebihan dan tidak sejalan dengan ideologi pemerataan dan keadilan sosial. Di satu sisi kita secara slogan mengumandangkan "semangat" pemerataan, namun struktur perekonomian yang kita bangun justru semakin mendorong terjadinya kesenjangan yang terus melebar. Ini adalah bentuk kesenjangan yang nyata antara ideologi yang ingin kita tegakkan dan pragmatisme pembangunan ekonomi pedesaan yang kita jalankan sehari-hari.

Perumusan ideologi pembangunan ekonomi pedesaan yang disertai dengan instrumen pelaksanaannya yang sesuai telah semakin mendesak untuk dibuat. Mencangkok begitu saja pemikiran ideologis yang digali dari khasanah pemikiran Barat, baik yang bersumber dari pemikiran ekonomi Marxisme maupun ekonomi liberalisme, tampaknya tidak bisa begitu saja diterima. Terlebih lagi jika penerimaan tadi tanpa diimbangi sikap kritis para peneliti sosial ekonomi pedesaan seperti yang terjadi pada 3-4 dekade terakhir ini. Kemampuan "tim Ekuin" Indonesia dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi pedesaan untuk membawa kesejahteraan masyarakat banyak masih patut diragukan. Mengakomodasi pemikiran dari peneliti sosial ekonomi pertanian dan pedesaan yang kaya dengan pengalaman empiris di lapangan tidak dapat ditunda lagi, dan mereka harus diajak bekerjasama dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di masa datang.

Para teknokrat ekonomi yang ada saat ini mendominasi pengelolaan kegiatan pembangunan perlu lebih membuka diri untuk menerima berbagai masukan dari kalangan pemikir ekonomi kerakyatan, sosiologi ekonomi, ekonomi pertanian, ekonomi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Perlu disadari bahwa masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan kita memperkuat perkembangan sektor pertanian dan perekonomian pedesaan sekarang ini dan beberapa tahun mendatang. Kajian holistik, dari aspek filosofis dan praktisnya, tentang

peranan pertanian dan pedesaan dalam penyehatan dan pemberlanjutan perekonomian nasional perlu mendapat prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1999. *Pembangunan Pertanian Sebagai Poros Penggerak Perekonomian Nasional*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Anonimous. 1996. *Harian KOMPAS* (17 Januari 1996), 13:1-9. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Anonimous. 1996. *Pengaruh Teknologi Terhadap Peranan Pertanian Dalam Struktur Perekonomian Indonesia*. Makalah Seminar Hasil Penelitian, 25-26 Maret 1996. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Aziz, I.J. 1996. *Kesenjangan Antara Ekonomi Makro dan Gejala Mikro: Keterbatasan Ilmu Ekonomi*. Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta (29 Februari 1996). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bagnasco, A. 1990. *The Informal Economy*. *Current Sociology*, 38(2/3): 157-174. Sage Publication. London.
- Buchory, M. 1996. *Aspek-aspek Edukatif Dalam Pemacuan Industrialisasi Pertanian*. Makalah Seminar Nasional "Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian", 17-18 Januari 1996. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Budiman, A. 1990. *Kapitalisme Ersatz: Sebuah Pengantar*. *dalam Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Oleh: Y. Kuno). LP3ES. Jakarta.
- Budiman, A. 1991. *Dari Patriotisme Ayam dan Itik Sampai ke Sosiologi Pengetahuan*. *dalam Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (K. Mannheim). Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- Geertz, C. 1989. *Penjaja dan Raja*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hidayat. 1987. *Peranan dan Profil Serta Prospek Pedagang Sektor Formal dan Informal Dalam Pembangunan*. Prisma, XVI (7):3-18. LP3ES. Jakarta.
- Hunt, E. 1995. *The Role of Intelligence in Modern Society*. *American Scientist*, 83 (July – August): 356-366.
- Kunio, Y. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, (terjemahan). LP2ES. Jakarta.
- Konzmanski, A.K. 1990. *Market and State in Centrally Planned Economies*. *Current Sociology*, 38(2/3): 133-155. Sage Publications. London.
- Maclver, R.M. and C.H. Page. 1962. *Society: An Introduction Analysis*. McMillan and Co. Ltd. London.
- Mannheim, K. 1991. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (terjemahan). Penerbit Kanisiun. Yogyakarta.
- Manning, C. and T.N. Effendi. 1985. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Martinelli, A. and N.J. Smelser. 1990. *Economic Sociology: Historical Threads and Analytic Issues*. *Current Sociology*, 38(2/3): 1-49. Sage Publications. London.
- Morishima, M. 1990. *Ideology and Economic Activity*. *Current Sociology*, 38(2/3): 51-77. Sage Publications. London.
- Mubyarto. 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*. Yayasan Agro-Ekonomika. Yogyakarta.
- Myrdal, G. 1980. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Neufeldt, V. and D.B. Guralnik. 1988. *Webster's New World Dictionary*. Webster's New World. New York.
- Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time*. Beacon Press. Boston.
- Penny, D.H. 1990. *Kemiskinan dan Peranan Sistem Pasar*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Pranadji, T. dkk. 1991. *Identifikasi Wilayah Miskin dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh: Kabupaten Aceh Besar*.
- Pranadji, 1993. *Kajian Ekologi Kebudayaan Terhadap Sektor Informal di Perkotaan: Suatu Proses Adaptasi Ketidakseimbangan Interaksi Kota-Desa Akibat Industrialisasi*. *Forum Agro Ekonomi*, 10(2) dan 11(1): 38-45. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2001. *Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Provinsi Lampung*. *Makalah Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi. Bogor.
- Pranadji, T. 2002. *Reformasi Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang Tertunda di Era Otonomi Daerah*. *Seminar Nasional dan Rekonsiliasi Mahasiswa Pertanian se Indonesia*, bertema: "Studi Kritis Pembangunan Pertanian dalam Dua Tahun Otonomi Menuju Kesejahteraan Petani" di Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 22 Mei 2002. Yogyakarta.
- Rachbini, D.J. 2002. *Korban Kebijakan Asing*. *Harian Republika*, 3 Desember 2002 (12):1-2. Jakarta.
- Rahardjo, M.D. 1990. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sajogyo. 1982. *Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai*. Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Scott, J.C. 1989. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Thijsse, J. 1982. *Apakah Jawa Akan Menjadi Padang Pasir? dalam Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai (Penyunting: Sajogyo)*. Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.